



## **ANALISIS POTENSI FAKTOR PENYEBAB BANJIR DI KECAMATAN DAYEUKHKOLOT KABUPATEN BANDUNG**

Adila Sani Heryanti<sup>1</sup>, Keyra Syifa Noveriza Supryatna<sup>2</sup>, Yuyu Rahayu<sup>3</sup>, Muhammad Andi  
Septiadi<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati/ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Jurusan Administrasi Publik/ Jl. A.H. Nasution No. 105,  
Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Corresponding author: e-mail: saniadila9@gmail.com

### **ABSTRAK**

Banjir yang berulang di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung menunjukkan belum efektifnya implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut dalam membangun ketahanan wilayah terhadap banjir. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir dipicu oleh faktor alam (curah hujan tinggi, topografi cekungan), teknis (drainase tidak memadai), dan sosial (kepadatan penduduk, perilaku membuang sampah, serta rendahnya partisipasi warga). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga faktor alam, teknis, dan sosial saling terkait dan secara kolektif memperkuat kerentanan wilayah terhadap banjir, sementara implementasi kebijakan pengurangan risiko banjir dinilai belum optimal akibat lemahnya koordinasi antar lembaga serta minimnya keterlibatan aktif dari masyarakat. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan sesuai karakteristik lokal guna memperkuat ketahanan wilayah menghadapi banjir.

**Kata kunci:** banjir, Dayeuhkolot, implementasi kebijakan, ketahanan wilayah, risiko bencana.

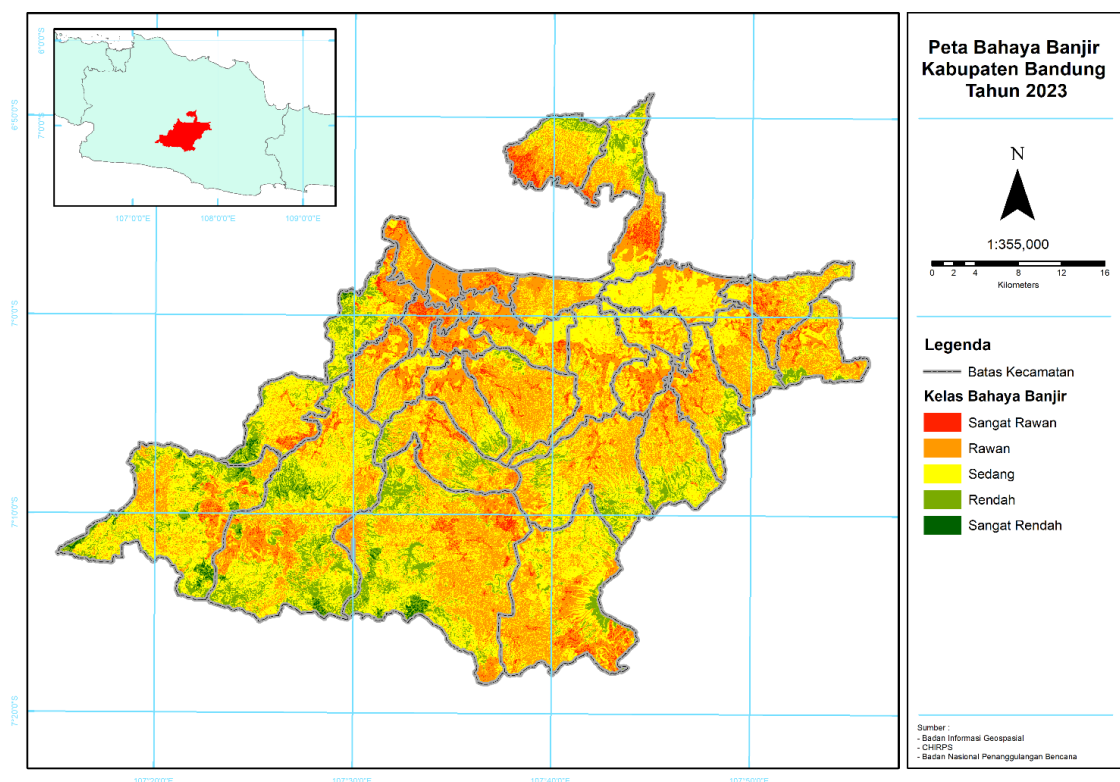
### **PENDAHULUAN**

Bencana alam selama ini sering dipandang sebagai *force majeure*, yakni peristiwa yang terjadi di luar kemampuan atau kendali manusia dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, menurut Siswanto, Nuradhawati, & Setiawan

(2025) untuk mengurangi jumlah korban akibat bencana alam, diperlukan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Meskipun Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan kebijakan pengurangan risiko bencana banjir dengan

tujuan untuk meningkatkan ketahanan wilayah dalam menghadapi ancaman bencana, terdapat kesenjangan antara harapan dan hasil yang tercapai (Muhamad, Sekarningrum, & Agma, 2017; Wahyuni, Syamsunasir, Subiyanto, & Azizah, 2022). Harapan dari kebijakan ini adalah terciptanya wilayah yang lebih siap, aman, dan tahan terhadap bencana banjir, dengan pengurangan signifikan terhadap jumlah korban dan kerugian material. Namun, dalam prakteknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi yang kurang optimal antara instansi terkait, serta rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi Masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Peirisal (2024), implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten

Bandung belum efektif, ditandai dengan lemahnya koordinasi antarlembaga dan kendala dalam pengalokasian anggaran yang berkelanjutan. Selain itu, meskipun telah ada upaya mitigasi, seperti pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, kenyataannya dampak banjir masih cukup signifikan di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan tujuan utama, yaitu peningkatan ketahanan wilayah. Gap antara harapan untuk menciptakan masyarakat dan wilayah yang tangguh bencana dengan hasil yang ada menandakan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.



**Gambar 1. Peta Bahaya Banjir di Kabupaten Bandung**  
Sumber: (Nabiil, 2024)

Gambar 1 menyajikan peta kerawanan banjir yang menggambarkan visualisasi spasial berdasarkan data.

Warna-warna pada peta mencerminkan tingkat risiko banjir yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

Kawasan dengan warna hijau merepresentasikan tingkat risiko "Sangat Rendah," sementara warna merah menunjukkan area dengan tingkat kerawanan "Sangat Tinggi." Sebaran warna pada peta menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang berada di sepanjang Sungai Citarum dan anak sungainya memiliki potensi banjir yang lebih tinggi, terlihat dari dominasi warna merah dan oranye di bagian tengah hingga utara.

Total area yang dianalisis dalam penelitian ini mencapai 170.003,82 hektare. Beberapa kecamatan yang memiliki luas wilayah dengan kategori "Sangat Rawan" cukup besar antara lain Baleendah (283,57 ha), Dayeuhkolot (136,81 ha), dan Pameungpeuk (172,68 ha). Ketiga wilayah ini kerap mengalami banjir, diduga karena kondisi topografinya yang rendah serta lokasinya yang berada di sekitar aliran sungai utama. Sementara itu, Kecamatan Ibum tercatat memiliki area dengan kategori "Sangat Rendah" terluas, yaitu 741,33 hektare, yang mengindikasikan rendahnya potensi banjir di wilayah tersebut, kemungkinan disebabkan oleh karakteristik geografisnya yang lebih tinggi dan letaknya yang jauh dari jalur sungai utama. Peta ini memberikan gambaran menyeluruh yang sangat berguna dalam mendukung upaya perencanaan dan strategi mitigasi banjir di Kabupaten Bandung.

Modal sosial dalam penanganan banjir di Kabupaten Bandung mencakup kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Kepercayaan antarwarga dan terhadap pemerintah menurun akibat banjir yang terus berulang serta kecurigaan terhadap penyaluran bantuan. Norma kebersamaan juga melemah karena masyarakat cenderung bergantung pada bantuan dari LSM dan pemerintah. Sementara itu, kepercayaan sosial dan jaringan antarwarga mulai terbentuk pascabencana, terutama melalui komunitas lokal yang aktif dalam kegiatan penanggulangan banjir. Hal ini ditunjukkan dalam

penelitian Muhamad et al. (Muhamad et al., 2017) yang menyebutkan bahwa dinamika sosial masyarakat mengalami penguatan setelah menghadapi bencana, di mana solidaritas dan kerja sama antarwarga meningkat dalam bentuk partisipasi pada kegiatan penyuluhan, pelatihan kebencanaan, serta aksi gotong royong. Meskipun demikian, partisipasi ini belum sepenuhnya merata dan masih bergantung pada inisiatif kelompok tertentu atau dorongan dari pemerintah setempat. Artinya, potensi sosial tersebut perlu terus dibina agar dapat menjadi kekuatan utama dalam pengurangan risiko bencana yang berbasis masyarakat. Menurut penelitian Permana (2023) Pemerintah Kabupaten Bandung berperan dalam pengurangan risiko bencana banjir melalui pembangunan infrastruktur seperti kolam retensi dan rumah pompa, serta pelibatan masyarakat dalam sosialisasi dan pelatihan kebencanaan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BPBD, dan elemen masyarakat. Selain itu, penelitian sebelumnya juga mengungkap bahwa meskipun BPBD Kabupaten Bandung belum memiliki sistem informasi bencana yang terintegrasi secara khusus, data yang telah dikumpulkan tetap digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pengurangan risiko bencana. Upaya komunikasi informasi kepada masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana (Wahyuni et al., 2022). Dalam penelitian lain, penerapan *collaborative governance* di Kabupaten Bandung dalam penanganan banjir dinilai cukup efektif meskipun belum maksimal. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta telah memberikan hasil yang positif. Namun, peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan koordinasi antar instansi masih diperlukan untuk mencapai efektivitas yang lebih besar (Wati, Fauzi, & Kushartono, 2025). Dalam penelitian Sitorus & Karniawati

(Sitorus & Karniawati, 2024), disebutkan bahwa kondisi cekungan di Dayeuhkolot secara alami menyebabkan air tertahan lebih lama dan sulit surut setelah hujan deras. Kondisi geografis ini membuat wilayah tersebut menjadi salah satu daerah dengan kerentanan banjir tinggi di Kabupaten Bandung. Lebih lanjut, pemerintah telah menerapkan berbagai strategi mitigasi banjir, baik yang bersifat struktural seperti pembangunan tanggul, taman hujan, dan drainase, maupun non-struktural seperti edukasi masyarakat, pengaturan zonasi, serta sistem peringatan dini. Namun, efektivitas upaya mitigasi ini masih sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, peningkatan kesadaran lingkungan, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta koordinasi yang lebih baik antar pihak terkait. Namun demikian, kurangnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana, dan masyarakat masih menjadi kendala utama dalam upaya pengurangan risiko banjir di Kabupaten Bandung. Aspek ini penting untuk diperhatikan karena secara langsung memengaruhi efektivitas kebijakan serta kesiapsiagaan wilayah dalam menghadapi bencana banjir.

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan pengurangan risiko bencana banjir telah diimplementasikan di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan ketahanan wilayah terhadap potensi bencana. Evaluasi ini menjadi penting karena terdapat ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan hasil di lapangan. Secara ideal, kebijakan ini dirancang untuk menciptakan wilayah yang lebih tangguh, aman, dan siap dalam menghadapi banjir. Namun, realitanya masih banyak daerah yang terdampak cukup parah akibat keterbatasan infrastruktur dan minimnya keterlibatan masyarakat. Dari sisi urgensi, karakteristik geografis Kecamatan Dayuehkolot yang rawan banjir, serta masih tingginya

frekuensi dan dampak banjir meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti pembangunan kolam retensi, floodway, dan polder, menunjukkan pentingnya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Kesenjangan antara kondisi ideal dan kenyataan menekankan perlunya peningkatan efektivitas implementasi, baik dari segi teknis maupun sosial. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek: secara teoritis, memperkaya kajian tentang efektivitas kebijakan pengurangan risiko bencana, dan secara praktis, menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif serta berbasis kolaborasi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan sistem mitigasi bencana yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika risiko banjir ke depan. Penelitian ini didasarkan pada teori penyebab banjir yang dikemukakan oleh Nugroho (2008), yang menyebutkan bahwa banjir disebabkan oleh kombinasi antara faktor alam seperti curah hujan tinggi, faktor teknis seperti sistem drainase yang tidak memadai, serta faktor sosial seperti kepadatan penduduk dan perilaku masyarakat dalam mengelola lingkungan. Berdasarkan teori tersebut, identifikasi potensi penyebab banjir di Kecamatan Dayeuhkolot dilakukan dengan memperhatikan ketiga faktor utama ini untuk memahami kontribusinya terhadap risiko banjir di wilayah penelitian.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam proses implementasi kebijakan pengurangan risiko banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Menurut Sugiyono

(2022), metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Penelitian ini menitik beratkan pada makna, pemahaman, serta interaksi sosial yang terjadi di lapangan, bukan sekadar mengukur hubungan antar variabel seperti dalam pendekatan kuantitatif. Karena itu, pendekatan kualitatif dianggap relevan untuk menggali dinamika pelaksanaan kebijakan yang melibatkan banyak aktor dan konteks sosial yang kompleks.

Penelitian ini menggunakan dimensi faktor alam dan faktor teknis berdasarkan teori Nugroho (2008), yang menjelaskan penyebab banjir dipengaruhi oleh dua faktor tersebut. Dimensi faktor alam meliputi curah hujan, topografi, dan kondisi sungai, sedangkan dimensi faktor teknis meliputi kapasitas drainase, pengelolaan sampah, dan tata guna lahan. Indikator-indikator ini dijadikan dasar dalam pengumpulan dan analisis data terkait potensi banjir di Kecamatan Baleendah. Penelitian ini menggunakan triangulasi metode untuk meningkatkan validitas dan keandalan data yang diperoleh. Dengan menggabungkan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengurangan risiko banjir (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña, 2014). Triangulasi metode memungkinkan peneliti untuk memverifikasi sehingga mengurangi potensi bias dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting dari hasil wawancara dan observasi.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan tabel tematik untuk mempermudah pemahaman. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan temuan utama dari hasil penelitian serta memberikan gambaran mengenai efektivitas dan tantangan dalam upaya pengurangan risiko banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada proses pelaksanaan kebijakan, termasuk upaya identifikasi potensi-potensi banjir di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, tanpa membahas aspek perumusan kebijakan atau evaluasi dampak jangka panjang. Pengumpulan data dilakukan pada 15 Mei 2025 melalui wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah daerah yang terkait, tokoh masyarakat setempat, serta warga yang terdampak langsung oleh banjir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

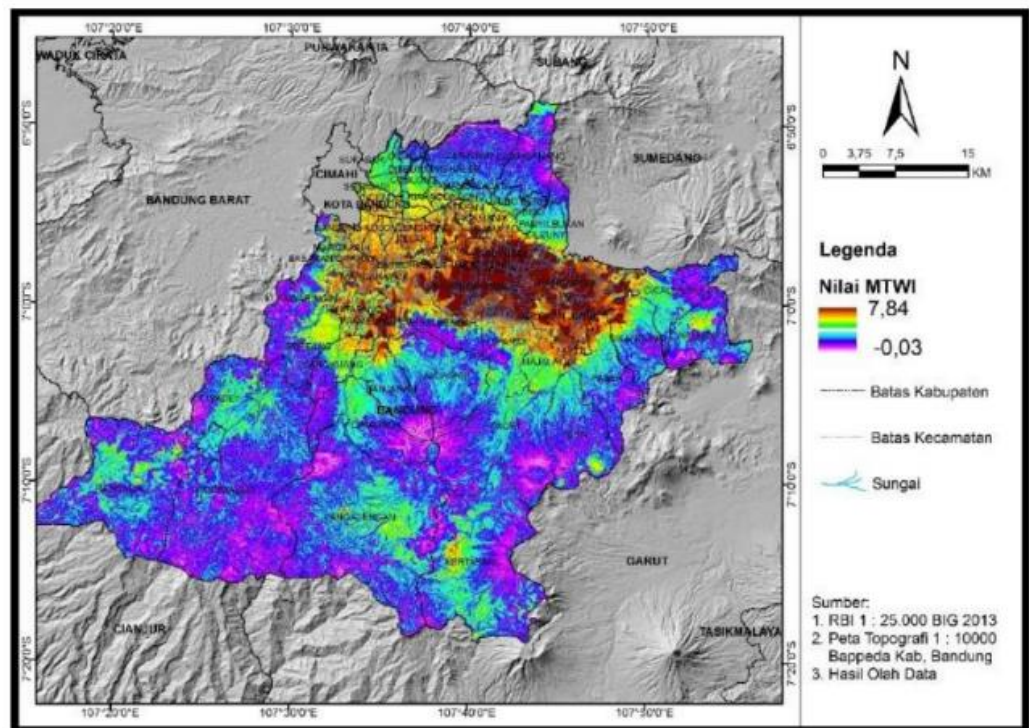
### 1. Analisis Faktor Alam terhadap Potensi Banjir di Kecamatan Dayeuhkolot

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, diketahui bahwa kondisi alamiah Kecamatan Dayeuhkolot berkontribusi signifikan terhadap tingginya potensi banjir di wilayah tersebut. Curah hujan yang tinggi, posisi geografis yang lebih rendah dibandingkan kawasan sekitarnya, serta kedekatan permukiman dengan aliran Sungai Citarum dan anak-anak sungainya menjadikan daerah ini sangat rentan terhadap genangan. Seorang informan dari masyarakat menyampaikan bahwa setiap kali hujan turun

dengan intensitas tinggi, air meluap dari sungai dan langsung memasuki area permukiman. Seorang warga yang tinggal di dekat bantaran sungai menyampaikan, “Kalau hujan besar, air dari sungai itu langsung naik ke jalan, apalagi rumah kami lebih rendah dari permukaan jalan, jadi pasti kebanjiran.” Warga lainnya menambahkan, “Biasanya baru dua jam hujan deras, air sudah ngumpul semua ke sini, kaya dituang dari atas.”

Hasil ini didukung oleh temuan dalam penelitian Irawan, Hidayat, & Tjahjono (Irawan, Hidayat, & Tjahjono, 2018) yang menyebutkan bahwa Kecamatan

Dayeuhkolot termasuk dalam zona risiko tinggi banjir di wilayah cekungan Bandung. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan spasial berbasis Digital Elevation Model (DEM), yang memperlihatkan bahwa Dayeuhkolot berada di dataran rendah dan menjadi lokasi akumulasi limpasan air dari kawasan hulu. Secara geomorfologi, daerah ini memang memiliki karakteristik cekungan, yang menyebabkan proses aliran dan penyerapannya lebih lambat dibandingkan wilayah yang lebih tinggi.



**Gambar Peta 2. Peta Indeks Kelembapan Topografi**

Sumber: (Irawan et al., 2018)

Peta indeks kelembapan topografi yang ditampilkan pada Gambar peta 2 memperlihatkan

distribusi kelembapan tanah di wilayah cekungan Bandung, termasuk Kecamatan Dayeuhkolot. Berdasarkan peta

tersebut, Dayeuhkolot berada pada zona dengan tingkat kelembapan tinggi, yang menandakan bahwa wilayah ini memiliki kemampuan menyerap air yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika curah hujan tinggi terjadi, air cenderung menggenang lebih lama karena tidak terserap secara optimal oleh tanah. Topografi yang rendah dan lembap ini turut memperparah risiko banjir di wilayah tersebut, khususnya pada musim penghujan.

Dokumen peta bahaya banjir Kabupaten Bandung (Nabiil, 2024) juga menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Dayeuhkolot tergolong dalam zona merah atau berisiko tinggi terhadap banjir, terutama pada musim penghujan. Selain itu, penelitian oleh Sitorus dan Karniawati (Sitorus & Karniawati, 2024) menggarisbawahi bahwa struktur cekungan yang membentuk wilayah ini menyebabkan tertahannya aliran air dalam waktu yang relatif lama, sehingga meningkatkan intensitas dan durasi genangan. Dengan demikian, baik hasil dokumentasi maupun studi ilmiah sebelumnya memberikan dukungan yang kuat terhadap temuan lapangan mengenai kerentanan alamiah wilayah Dayeuhkolot.

Dari hasil triangulasi antara data observasi, wawancara informan, dan kajian dokumen serta literatur ilmiah, dapat disimpulkan bahwa faktor alam merupakan penyebab dominan dari potensi banjir di Dayeuhkolot. Risiko ini bersifat sistemik dan tidak dapat

ditangani hanya dengan intervensi teknis semata. Oleh karena itu, strategi mitigasi harus dirancang secara adaptif dengan mempertimbangkan karakteristik topografi lokal, serta didukung oleh tata ruang yang sesuai dengan kondisi cekungan dan sistem aliran air setempat.

## 2. Analisis Faktor Teknis terhadap Potensi Banjir di Kecamatan Dayeuhkolot

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi teknis dari pemerintah seperti pembangunan drainase di beberapa wilayah belum merata dan cenderung berfokus pada titik tertentu. Area seperti RW 9 dan RW 10 masih mengalami persoalan serius, seperti saluran air yang tidak berfungsi, tertutup beton, bahkan sengaja ditutup oleh warga karena justru memperparah banjir. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan teknis yang dilakukan belum berbasis kebutuhan lapangan secara menyeluruh. Distribusi pembangunan yang tidak merata membuat beberapa wilayah tetap rentan terhadap banjir meski infrastruktur telah dibangun di tempat lain.

Berdasarkan wawancara, warga menyampaikan bahwa perawatan terhadap infrastruktur yang telah dibangun sangat minim. Seorang warga RW 9 menuturkan, “Drainase di depan rumah saya bukan cuma mampet, tapi juga malah ditutup warga karena airnya balik masuk ke rumah.” Warga lainnya menambahkan, “Udah sering lapor, difoto, katanya mau dibenerin tapi sampai sekarang



gak ada yang datang. Akhirnya ya kami anggap udah percuma.” Drainase di sekitar pemukiman banyak yang tersumbat dan tidak pernah diperbaiki, meskipun sudah dilaporkan melalui dokumentasi oleh petugas. Bahkan, ada infrastruktur seperti kolam retensi yang dirasa tidak memberikan dampak nyata karena letaknya jauh dari lokasi banjir. Hal ini mencerminkan lemahnya respons pemerintah dalam mengelola sistem pengendalian banjir secara terpadu dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Putri (2023), yang menunjukkan bahwa efektivitas drainase kota tidak hanya ditentukan oleh kapasitas fisik saluran, tetapi juga oleh aspek manajemen dan pemeliharaan rutin. Studi mereka di Jakarta menunjukkan bahwa drainase yang tersumbat dan tidak terawat secara signifikan memperparah genangan, terutama pada wilayah permukiman padat.

Temuan dari studi sebelumnya memperkuat bahwa masalah utama terletak pada lemahnya koordinasi antarlembaga dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan proyek. Penelitian oleh Peirisial (Peirisal, 2024) menyoroti buruknya koordinasi teknis dan tidak terintegrasinya program infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Rafdi & Kusumah (Rafdi & Kusumah, 2023) menjelaskan bahwa Kelurahan Andir mengalami genangan yang berlangsung hingga 10 hari akibat kinerja drainase yang tidak optimal. Mereka juga menekankan bahwa manajemen

drainase yang buruk, penambahan jumlah limbah, dan kurangnya pemeliharaan memperburuk kondisi banjir. Oleh karena itu, perencanaan infrastruktur harus selaras dengan prinsip ketahanan terhadap perubahan iklim (climate resilient infrastructure), termasuk penggunaan material yang sesuai dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan banjir melalui pendekatan teknis di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya efektif. Kelemahan tersebut tidak hanya terkait aspek fisik infrastruktur, tetapi juga pada sistem perencanaan dan pengelolaan yang tidak inklusif. Ketika warga terpaksa menutup saluran air sebagai bentuk protes, itu menandakan kurangnya ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan teknis. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang bersifat kolaboratif, berkelanjutan, dan berbasis data lokal—baik dalam pembangunan infrastruktur baru maupun pemeliharaan fasilitas yang sudah ada.

### 3. Analisis Faktor Sosial terhadap Potensi Banjir di Kecamatan Dayeuhkolot

Permasalahan banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung, khususnya di kawasan RW 9 Desa Citeureup, Dayeuhkolot tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor sosial yang saling berkaitan. Berdasarkan teori Nugroho (2008), faktor sosial seperti kepadatan penduduk, tata



guna lahan, dan perilaku masyarakat menjadi komponen utama dalam memengaruhi potensi terjadinya banjir, terutama di kawasan urban. Teori ini menjadi landasan untuk menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan dengan warga serta membandingkannya dengan data dokumen dan penelitian lain yang relevan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kawasan RW 9 mengalami peningkatan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, dengan jumlah sekitar 216 Kepala Keluarga (KK), mayoritas di antaranya merupakan pendatang dari luar daerah. Kondisi ini memperlihatkan gejala urbanisasi yang tidak diimbangi dengan perencanaan infrastruktur yang memadai, terutama dalam hal sistem drainase dan ruang terbuka hijau. Kepadatan ini mencerminkan salah satu indikator dari teori Nugroho bahwa tingginya konsentrasi penduduk memperbesar potensi terjadinya genangan dan banjir akibat berkurangnya daerah resapan air. Tingginya densitas penduduk seringkali tidak disertai peningkatan kualitas dan kapasitas drainase, yang menyebabkan banjir menjadi fenomena tahunan di kawasan tersebut.

Selain itu, perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah turut memperparah kondisi. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat dilarang membuang sampah ke sungai atau selokan, terlebih ke Sungai Citarum yang saat ini berada dalam

pengawasan ketat melalui program “Citarum Harum”. Namun, informan mengakui bahwa masih terdapat sebagian warga yang membuang sampah dari atas jembatan, yang menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan saluran air. Hal ini sesuai dengan teori Nugroho yang menyatakan bahwa perilaku sosial seperti membuang sampah sembarangan dapat menjadi penyebab langsung dari tersumbatnya drainase. “Dulu mah banyak yang buang sampah ke selokan, tapi sekarang udah agak mendingan karena ada iuran sampah,” ujar salah satu warga RW 9. Namun, ia juga mengeluhkan, “Kerja bakti mah ada, tapi cuma bersih-bersih kecil, kalau soal selokan yang mampet itu tergantung RT mau gerak atau enggak.” Beberapa warga juga mengaku kecewa karena saluran air yang rusak dibiarkan terlalu lama tanpa tindakan dari pihak berwenang. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Muhamad et al. (Muhamad et al., 2017) yang menunjukkan bahwa kepercayaan sosial dan jaringan antarwarga mulai terbentuk pascabencana, meskipun partisipasi belum maksimal. Dengan demikian, persoalan banjir tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek budaya dan kebiasaan Masyarakat.

Dalam hal partisipasi masyarakat, warga RW 9 menyebutkan bahwa kerja bakti rutin masih dilakukan, namun lebih terbatas pada kegiatan

ringan seperti membersihkan halaman masjid atau area pasar masing-masing pedagang. Untuk kegiatan berat seperti membersihkan atau memperbaiki saluran air, keterlibatan masyarakat sangat terbatas dan lebih bergantung pada inisiatif dari masing-masing RT. Penelitian Permana (Permana, 2023) juga menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi penentu keberhasilan program pengurangan risiko bencana, ini artinya tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan di perkotaan adalah lemahnya budaya kolektif dalam merawat fasilitas umum. Padahal, peran aktif masyarakat dalam membersihkan lingkungan menjadi kunci utama dalam mencegah banjir skala lokal.

Di sisi lain, dari aspek kebijakan, warga mengakui bahwa pemerintah telah memberikan bantuan sosial dan membangun infrastruktur kecil seperti spiteng dan saluran jalan. Namun, mereka kecewa karena kerusakan sistem drainase tidak kunjung ditangani. Bahkan, beberapa warga memilih menutup saluran air secara mandiri karena merasa laporan yang diajukan tidak ditanggapi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Menurut Nugroho (Nugroho, 2008), tata kelola pemerintah terhadap infrastruktur menjadi faktor penting dalam menekan risiko banjir. Lambannya respon dan kurangnya perawatan sistem drainase merupakan masalah umum yang memperburuk banjir.

Berdasarkan hasil triangulasi antara data wawancara, dokumen, serta landasan teori dari Nugroho (Nugroho, 2008) dan berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial memainkan peran signifikan dalam memperbesar risiko banjir di wilayah tersebut. Terdapat tiga faktor sosial utama yang saling berinteraksi, yakni: kepadatan penduduk yang tinggi, perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, dan minimnya partisipasi warga serta lemahnya respons pemerintah terhadap infrastruktur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa potensi banjir di Kecamatan Dayeuhkolot tidak pada berdiri satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari keterkaitan antara faktor alam, teknis, dan sosial yang saling memperkuat. Kondisi topografi cekungan dan curah hujan tinggi menciptakan kerentanan alamiah yang diperparah oleh infrastruktur pengendalian banjir yang belum optimal serta pola perilaku masyarakat yang belum seluruhnya mendukung upaya pengurangan risiko. Ketidakseimbangan antara perencanaan teknis, kepadatan penduduk, dan rendahnya partisipasi publik menunjukkan bahwa tantangan pengendalian banjir di wilayah ini bersifat kompleks dan memerlukan pendekatan kolaboratif yang berbasis pada karakteristik lokal, tata kelola yang responsif, serta peran aktif masyarakat. Selain itu Anugrah (2020) dalam penelitiannya menekankan bahwa sinergi antara pemerintah

daerah dan masyarakat menjadi kunci dalam pengurangan risiko banjir. Mereka menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan implementasi kebijakan mitigasi banjir dapat meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus memperkuat ketahanan sosial.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi banjir di Kecamatan Dayeuhkolot disebabkan oleh kombinasi faktor alam berupa topografi cekungan dan curah hujan tinggi, faktor teknis seperti sistem drainase yang tidak berfungsi optimal dan tidak merata, serta faktor sosial berupa kepadatan penduduk dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Ketiganya saling memperkuat dan belum tertangani secara menyeluruh oleh kebijakan pengurangan risiko banjir yang ada. Berdasarkan temuan tersebut, solusi yang direkomendasikan meliputi pembangunan ulang sistem drainase dengan skala lingkungan dan kelurahan, pengerukan sungai secara berkala, serta evaluasi kembali lokasi permukiman padat yang berada di wilayah cekungan. Selain itu, keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan melalui kerja bakti terstruktur dan program edukasi lingkungan yang terintegrasi dengan kebijakan teknis. Perbaikan penanganan banjir di Dayeuhkolot harus didasarkan pada pendekatan kolaboratif dan adaptif yang mempertimbangkan kondisi fisik wilayah serta kapasitas sosial warga secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

[1] Anugrah, A. R. S. (2020). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Analisis*

Peran Pemerintah dalam Penanganan Banjir di Kota Pontianak: Implementasi Kebijakan dan Koordinasi Lintas Sektor. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 8(1), 163–171.

- [2] Irawan, M. F., Hidayat, Y., & Tjahjono, B. (2018). Penilaian Bahaya Dan Arahan Mitigasi Banjir Di Cekungan Bandung. *Jurnal Ilmu Tanah Dan Lingkungan*, 20(1), 1–6. <https://doi.org/10.29244/jitl.20.1.1-6>
- [3] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña, A. S. U. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*.
- [4] Muhamad, R. A. T., Sekarningrum, B., & Agma, Y. M. (2017). Modal Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Banjir (Kasus Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat). *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(2), 101–114.
- [5] Nabiil, B. (2024). Pendekatan SIG dalam Penentuan Zona Kerawanan Banjir Kabupaten Bandung Menggunakan Metode Complete Mapping Analysis (CMA).
- [6] Nugroho, S. P. (2008). Analisis Curah Hujan Penyebab Banjir Besar di Jakarta Pada Awal Februari 2007. *JAI*, 4.
- [7] Peirisal, T. (2024). Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung. *JURNAL STUDI ADMINISTRASI PUBLIK*, 8(2).
- [8] Permana, D. (2023). Peran pemerintah daerah dalam menanggulangi risiko bencana banjir di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu*

- Sosial*, 21(2), 156–165.
- [9] Putri, M. A., Maulana, A., & Murtinugraha, E. (2023). Evaluasi Saluran Drainase Perkotaan (Studi Kasus; Jalan Bungur Besar Raya, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat). *Prosiding Seminar Pendidikan Kejuruan Dan Teknik Sipil (E-Journal)*, 1.
- [10] Rafdi, M. A., & Kusumah, D. O. S. (2023). Peran Infrastruktur Jalan Dan Drainase Dalam Upaya Adaptasi Dan Mitigasi Bencana Banjir Terkait Konsep Climate Resilient Infrastructure Studi Kasus: Kecamatan Baleendah. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 402. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3020>
- [11] Siswanto, E., Nuradhawati, R., & Setiawan, A. (2025). Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Bandung. *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- [12] Sitorus, D. N., & Karniawati, N. (2024). Strategi Pemerintah dalam Mitigasi Banjir Kecamatan Dayeuhkolot. *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, 1(1), 39–46.
- [13] sugiyono. (2022). *metode penelitian kualitatif*. Retrieved from file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/metode-penelitian-2022-sugiyono\_compress.pdf
- [14] Wahyuni, D., Syamsunasir, S., Subiyanto, A., & Azizah, M. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Bencana Banjir di Kabupaten Bandung Untuk Mewujudkan Masyarakat Tangguh Bencana. *PENDIPA Journal of Science Education*, 6(2), 516–521.
- [15] Wati, U. S., Fauzi, L. M., & Kushartono, T. (2025). Collaborative Gpvernance Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1).